



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGUATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Suhartono

Analisis Legislatif Ahli Madya
suhartono2@dpr.go.id

Fitria Melinda

Analisis Legislatif Ahli Pertama
fitria.melinda@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Di Sidang Paripurna MPR RI usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih periode tahun 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan akan menjadi prioritas utama dan target yang akan dicapai dalam pemerintahannya di beberapa tahun mendatang. Prioritas tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketidakpastian global sehingga Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan. Untuk memastikan ketercapaian swasembada pangan dan ketahanan pangan dalam jangka panjang, Indonesia membutuhkan pengembangan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kuat agar tercapai peningkatan produksi dan distribusi pangan.

Kementerian Pekerjaan Umum, walaupun bukan penanggung jawab utama pada pembangunan sektor pangan, memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur yang mendukung prioritas dan tugas utama dari Kementerian Pertanian, yaitu tercapainya swasembada pangan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan telah direncanakan pembangunan puluhan bendungan baru yang memiliki peran multifungsi, pemeliharaan bendungan yang sudah ada untuk menjaga kapasitas tampungan air, serta revitalisasi dan perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Pembangunan bendungan multifungsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan listrik. Selain itu, pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung pada bendungan dapat memproduksi hidrogen hijau (*green ammonia*), sebagai bahan baku pupuk yang berguna bagi produksi pangan nasional.

Bendungan ini dapat memberikan manfaat optimal dengan menerapkan Program Padat Karya Tunai dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunannya, termasuk dalam peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi. Salah satu program yang mendukung upaya ini adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). P3-TGAI berfokus pada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi melalui partisipasi aktif masyarakat dan dilaksanakan secara swakelola oleh berbagai organisasi petani. P3-TGAI telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi. Sejak Januari hingga November tahun 2024, terdapat 292 usulan P3-TGAI yang diajukan kabupaten/kota telah mendapatkan persetujuan pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program ini di 10.000 lokasi lainnya guna mendukung perbaikan infrastruktur irigasi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Kelanjutan dari program ini menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat yang ditawarkan, lemahnya transparansi dalam penggunaan dana, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut.

Dari rencana 61 bendungan terbangun dalam periode tahun 2015-2024, telah terbangun 53 bendungan dan sisanya 8 bendungan masih terus dilakukan proses penyelesaian. Proses penyelesaian yang saat ini sedang berjalan meliputi Bendungan Jlantah di Jawa Tengah dengan

kapasitas 10,97 juta m³ untuk mengairi 1.494 ha; Bendungan Rukoh di Aceh dengan kapasitas 128 juta m³ untuk mengairi 11.950 ha; Bendungan Keureuto di Aceh dengan kapasitas 215,94 juta m³ untuk mengairi 9.455 ha; serta Bendungan Way Apu di Maluku dengan kapasitas 50,05 juta m³ untuk mengairi 10.000 ha. Melalui pembangunan bendungan tersebut diharapkan indeks pertanaman meningkat dari 125% menjadi 209%, serta memperluas jangkauan layanan air irigasi dari 761 ribu ha di tahun 2015 menjadi 1,2 juta ha di tahun 2024.

Namun demikian, penyelesaian sejumlah proyek pembangunan bendungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah pembebasan lahan, kondisi geologi yang dapat memengaruhi struktur bendungan, dan dampak lingkungan yang timbul sepanjang proses pembangunannya. Sebagai upaya mengatasi kendala yang ada pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah perbaikan. *Pertama*, proses pembebasan lahan harus melibatkan mediasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dan konflik dapat diminimalisir. *Kedua*, evaluasi kondisi geologi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan struktur bendungan yang aman sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan bangunan yang dapat berakibat fatal. *Ketiga*, peningkatan sosialisasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program. *Keempat*, transparansi dalam penggunaan anggaran dengan akuntabilitas yang jelas untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program.

Atensi DPR

Pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk proyek bendungan multifungsi, rehabilitasi, peningkatan, serta pembangunan jaringan irigasi hingga pada tahap optimalisasi fungsinya, memerlukan perhatian khusus dari Komisi V DPR RI untuk menjamin keberhasilan prioritas swasembada dan ketahanan pangan nasional. Komisi V DPR RI perlu memantau pengalokasian dan penggunaan anggaran, memastikan efisiensi dalam proses pembebasan lahan, serta mengawasi kepatuhan terhadap jadwal konstruksi yang telah ditetapkan. Mengingat bendungan dan irigasi merupakan infrastruktur penting dalam mencapai target swasembada pangan, Komisi V DPR RI juga perlu memastikan efektivitas koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam P3-TGAI menjadi aspek penting untuk mendorong partisipasi yang berkelanjutan sehingga infrastruktur yang terbangun dapat dioptimalisasi untuk memberikan manfaat bagi ketahanan pangan jangka panjang.

Sumber

antaranews.com, 31 Oktober 2024;
Bisnis Indonesia, 30 Oktober 2024;
detiknews.com, 27 Oktober 2024;

kompas.com, 29 Oktober 2024;
kontan.co.id, 30 Oktober 2024; dan
tempo.co, 30 Oktober 2024.



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024